

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan salah satu fenomena yang memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi bahkan model hubungan antarbangsa. Pada hubungan antarbangsa banyak sekali terjadi perubahan seperti peran negara yang selama ini menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional dengan globalisasi memunculkan aktor-aktor politik non-negara yang dapat ikut mempengaruhi kebijakan dan model hubungan internasional.<sup>1</sup> Aktor-aktor non-negara yang kini mampu terlibat pada hubungan internasional diantaranya seperti organisasi internasional, *Multinational Corporation* (MNC), Pemerintah Daerah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).<sup>2</sup> Keterlibatan aktor non-negara dalam hubungan internasional disertai kepentingan masing-masing yang sangat beragam. Kepentingan ini dapat terwujud melalui berbagai cara seperti kerjasama politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial bahkan sistem kerjasama yang berkaitan dengan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1 ayat (1) Tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa Hubungan Internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau

---

<sup>1</sup> T. May Rudi. (2003). "*Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*". Bandung: Refika Aditama. hlm. 1.

<sup>2</sup> Robert Jackson dan George Sorensen. (1999). "*Introduction to International Relation*". New York: Oxford University. hm. 34-35.

lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara.<sup>3</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa kini tidak hanya negara saja yang dapat menjadi aktor di lingkup internasional melainkan pemerintah daerah. Adanya ruang lingkup dan jangkauan terhadap dunia tanpa batas ini telah mengubah paradigma sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional. Lingkup tanpa batas dan fenomena globalisasi juga memunculkan diplomasi baru yaitu paradiplomasi atau sebuah konsep yang didalamnya melibatkan pemerintah daerah dalam hubungan internasional yang didasarkan oleh kepentingan yang ingin dicapai dan hubungan antarbangsa yang sifatnya semakin kompleks dimana pada hubungan internasional yang awalnya hanya melibatkan negara dan negara (*Government to Government*) kini telah berkembang dan memunculkan hubungan baru antara negara atau pemerintah dengan perusahaan (*Government to Business*).

Di Indonesia dapat dilihat, perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan negara melalui kewenangan negara kepada Pemerintah Daerah (desentralisasi). Pemerintah Daerah saat ini telah diberi kesempatan besar untuk menjalankan hubungan kerjasama luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan kewenangan mengadakan kerjasama luar negeri ini masuk dalam kategori kewenangan tidak wajib bagi daerah. Pasal 88 ayat (1) memaklumkan hal ini sebagai berikut; Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1 ayat (1) Tentang Hubungan Luar Negeri.

dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (yaitu Politik Luar Negeri).<sup>4</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan Pemda dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas daerahnya. Adanya kebijakan tersebut, daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, termasuk keleluasaan untuk melaksanakan hubungan kerjasama maupun melakukan pengelolaan SDA maupun SDM.<sup>5</sup> Daerah memiliki wewenang menyusun, menjalankan, mengawasi, mengontrol dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakannya sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai penggerak, pemberi fasilitas, koordinator dan sekaligus sebagai wirausaha dalam menjalankan pembangunan daerah. Sistem ini juga memberikan kesempatan bagi daerah agar mampu berkompetisi di arena internasional. Otonomi menjadi pendorong agar daerah lebih siap dalam menerima tantangan investasi dan menjaring investor luar negeri agar anggaran belanja daerah mampu didapatkan secara mandiri selain dari anggaran belanja pemerintah pusat.<sup>6</sup>

Kegiatan Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena investasi berkaitan dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan maka sering disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi menjadi satu pendukung

---

<sup>4</sup> Takdir Ali Mukti. (2013), "*Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*", Yogyakarta: The Phinisi Press. hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Mardiasmo. (2002), "*Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*". Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm. 36.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 42.

dalam proses pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah, berbagai kebijakan disusun untuk membentuk dan menyesuaikan bagaimana pola dan peran investasi dapat berjalan dan dapat difungsikan secara efisien. Kebijakan yang diterapkan di suatu wilayah tentu sudah mendapat kesepakatan dari pemerintah dan lembaga investasi setempat, serta didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri lembaga yang berwenang dalam urusan investasi bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedangkan di tingkat daerah dikenal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), di Provinsi Jawa Tengah lebih populer dengan sebutan BPMD (Badan penanaman Modal Daerah) namun sejak awal tahun 2017 berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tugas Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>7</sup>

Untuk menyukseskan investasi maupun penanaman modal di Indonesia dan daerah, tiap-tiap lembaga juga memerlukan suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang disebut dengan strategi. Istilah strategi sendiri berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah Daerah harus mampu melengkapi perangkat investasi baik berupa fasilitas maupun sistem regulasi. Sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2017), “Tugas dalam *Tugas dan Fungsi*”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diakses dari, [http://dpmptsp.jatengprov.go.id/page/tugas\\_pokok\\_&\\_fungsi](http://dpmptsp.jatengprov.go.id/page/tugas_pokok_&_fungsi), pada 23 Maret 2017.

pemerintahan daerah di Indonesia Jawa tengah yang memiliki luas area ±3,25 juta hektar (1,2% dari luas Indonesia) sudah tentu memiliki bermacam potensi untuk investasi. Dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal di Jawa Tengah juga didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung, karena letak Jawa Tengah yang strategis dan memiliki Bandar Udara Internasional di Semarang dan Solo, pelabuhan laut Internasional di Semarang dan Cilacap, dilalui jalur kereta api bahkan dilalui jalur tol yang mempermudah akses. Selain didukung sarana dan prasarana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan pelatihan dan peningkatan SDM.

Di Jawa Tengah terdapat beberapa potensi yang dijadikan sebagai investasi seperti peternakan, industri, pariwisata, perumahan, perikanan, pertambangan, listrik dan masih banyak lagi. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah membagi potensi yang direkomendasikan untuk investasi menjadi 3 sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Pada sektor primer terdiri dari peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perikanan; sektor sekunder terdiri dari industri; sektor tersier terdiri dari pengelolaan kawasan, jasa, konstruksi dan perdagangan.

Pada tahun 2013 merupakan masa pergantian Gubernur Jawa Tengah dari Bibit Waluyo ke Ganjar Pranowo. Pada awal kepemimpinan, umumnya akan menjadi tahap pengenalan lingkungan dan belum begitu memperlihatkan pola dan peran kepemimpinan. Berbeda dari yang lain, pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memperlihatkan kemahirannya dalam

membina bidang investasi asing, seperti yang ditunjukkan oleh tabel realisasi investasi asing Provinsi Jawa Tengah pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Investasi Jawa Tengah 2008-2015**

Provinsi	Investasi							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah	135,6	83,1	59,1	175	241,5	464,3	463,4	850

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (juta US\$) tahun 2008–2015. Dapat dijelaskan jika realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 awal kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 di era Gubernur sebelumnya sebesar 241,5 US\$ menjadi 464,3 juta US\$ atau naik 222.8 US\$. Akan tetapi, pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan realisasi investasi 0,9 US\$ menjadi 463,4 US\$. Namun pada tahun 2015 realisasi investasi mengalami peningkatan menjadi 850 US\$ atau sekitar 386,6 US\$. Tentunya peningkatan realisasi investasi asing di Provinsi Jawa Tengah disertai strategi cemerlang yang telah didasarkan pada syarat-syarat tertentu yang dapat menarik minat investor asing sehingga mampu menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Apalagi dalam setiap aktivitas penanaman modal asing (PMA) tentunya tidak selalu berjalan sesuai rencana melainkan terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat kelancaran aktivitas penanaman modal. Untuk itu melalui strategi yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berdasarkan evaluasi terhadap hambatan maupun masalah yang terjadi di tengah aktivitas penanaman modal asing (PMA) yang telah

dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan persuasif yang berbeda dari waktu ke waktu pada masing-masing calon investor asing yang hendak menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Strategi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu ini juga disesuaikan pada sasaran bidang yang akan diolah oleh calon investor. Strategi yang dilakukan tentunya juga harus berdasarkan bukti-bukti yang telah dievaluasi sebelumnya agar calon investor asing merasa yakin untuk menanamkan harapan masa depannya di wilayah “Jantung Pulau Jawa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah:

**Bagaimana Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menarik Investasi Asing Tahun 2013-2015?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih konsep dan teori untuk menyusun hipotesa.<sup>8</sup> Konsep sendiri menurut Mohtar Mas’oed diartikan sebagai abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Sedangkan teori adalah suatu pandangan tentang apa yang terjadi.<sup>9</sup> Pada tulisan ini penulis akan menggunakan konsep strategi, teori penanaman modal dan konsep paradiplomasi.

---

<sup>8</sup> Mohtar Masoed. (1990), *“Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”*. Jakarta: LP3ES. hlm. 93.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 185.

## 1. Konsep Strategi

Strategi menurut John P. Lovell dalam bukunya *Foreign Policy in Perspective* sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Masoed dalam bukunya *Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi* mengatakan mengatakan bahwa :

“Strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. (*any predesigned set of moves, or series of decisions, in a competitive situation where the outcome is not governed purely by chance*)”<sup>10</sup>

Sedangkan strategi menurut Glaeck ialah :

“*suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategis organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai*”.<sup>11</sup>

Dengan melihat beberapa pengertian di atas strategi merupakan serangkaian langkah-langkah atau rencana yang telah dirancang dengan menghubungkan kekuatan organisasi dan lingkungan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menyusun strategi diperlukan adanya suatu tujuan sehingga terlihat jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kekuatan strategis yang merupakan modal untuk mencapai tujuan utama tersebut.

Dengan kekuatan organisasi dan lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah dan kekuatan strategi yang dimiliki yaitu sumber daya alam (SDA). Maka rencana-

---

<sup>10</sup> Mohtar Masoed. (1989), “*Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisis dan Teorisasi)*”. Yogyakarta: PAU. hlm. 90.

<sup>11</sup> R.A Souriono. 1986. “*Strategi Perumusan*”. Yogyakarta. hlm. 9.



rencana yang telah dan akan dirancang dapat saling berkaitan satu sama lain sesuai tujuan utama sehingga lebih mudah terwujud. Sebagai wilayah yang dikenal sebagai wilayah industri maka Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan investasi, berkat dukungan infrastruktur, pemerintahan dan iklim ekonomi politik yang semakin kondusif untuk bersaing dalam kajian ekonomi strategis. Dengan beberapa persiapan yang dilakukan mulai dari persiapan kondisi internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) orang-orang dalam organisasi; mempersiapkan anggaran untuk menunjang berjalannya proses menarik minat investor asing; mempersiapkan peraturan atau landasan hukum terkait calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Jawa Tengah serta mempersiapkan dan mengevaluasi potensi sumber daya alam (SDA) yang hendak ditawarkan serta melakukan perbaikan taraf sumber daya manusia (SDM) masyarakat Provinsi Jawa Tengah agar membuka diri untuk kasus penanaman modal asing dengan menyediakan pelatihan atau pendidikan khusus agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman modal asing yang berjalan di wilayah mereka agar tidak terjadi eksploitasi yang dapat merugikan lingkungan investasi.

Dalam perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun

strategi dengan melakukan upaya-upaya untuk menjalankan visi misi dalam kebijakan investasi asing. Strategi memiliki empat unsur yaitu<sup>12</sup>:

1. Kemampuan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya yang dimilikinya, hal ini bisa dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan DPMPTSP dalam meningkatkan angka realisasi investasi Jawa Tengah seperti membenahan kualitas SDM pegawai DPMPTSP pada masing-masing bidang. Seperti membenahan SDM pada bidang promosi perlu dilakukan agar dalam bidang tersebut diisi oleh orang-orang kreatif. Serta memiliki jiwa *entrepreneur* atau jiwa pekerja keras, tekun, memiliki keyakinan kuat dan disiplin. Kreatif dalam arti pegawai harus mampu menciptakan ide-ide yang dapat menarik dan memberikan keyakinan terhadap calon investor, agar tujuan DPMPTSP Jawa Tengah untuk meningkatkan angka realisasi investasi asing dapat terwujud. Apalagi dengan tersedianya potensi sumberdaya di bidang industri, pesona alam/pariwisata, perikanan, pertambangan kecil, perkebunan bahkan perhutanan menjadikan keunggulan tersendiri bagi wilayah ini. Namun, keberhasilan DPMPTSP Jawa Tengah dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal disini tergantung koordinasi dalam menjalankan misi pada tiap-tiap strategi yang berbasis pada kemampuan SDM.

---

<sup>12</sup> Mohtar Masoed.Op.cit., hlm. 90-91.

2. Lingkungan : Posisi Provinsi Jawa Tengah cukup strategis bagi wilayah investasi karena berada di tengah Pulau Jawa, serta adanya sarana dan prasarana seperti jalur kereta api, pelabuhan bahkan bandar udara akan membuat mobilitas kegiatan penanaman modal di wilayah ini semakin efisien. Selain itu iklim politik dan ekonomi yang kondusif dan pro terhadap investasi, juga menjadi pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memulai kegiatan investasi asing. Karena faktor ini juga menjadi pertimbangan calon investor agar mereka memiliki rasa aman dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan usahanya di suatu wilayah.
3. Tujuan : Menunjukkan kualitas ekonomi politik Jawa Tengah yang mampu bersaing dengan Provinsi lainnya dan menunjukkan meningkatnya jumlah investor asing yang menanamkan modal di Jawa Tengah. Serta berkaitan dengan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu membantu tugas Gubernur dalam bidang penanaman modal khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Teori Penanaman Modal**

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai aktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing di suatu wilayah. Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal

Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.<sup>13</sup>

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang mendukung variabel lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut *human capital*.<sup>14</sup>

Sedangkan variabel non-ekonomi yang mendukung masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum, sosial dan budaya yang melekat pada suatu negara (*clean government and good government*) baik tuan rumah (*host country*) maupun pemerintah asal penanaman modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal.

Faktor selanjutnya ialah variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Variabel ini kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan.<sup>15</sup> Dalam hal ini setiap penanam modal diharuskan memiliki karakteristik yang khas yang ditujukan untuk memaksimalkan tingkat

---

<sup>13</sup> Sidik Jatmika. (2001). "*Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*". Yogyakarta: Bigraf. Hlm. 78.

<sup>14</sup> Sidik Jatmika. *Ibid.* Hlm. 79

<sup>15</sup>Rugman, A. M. (1993). "*Bisnis Internasional I*". Jakarta: PT. Internasa. hlm. 147.

keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah (*host country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori tersebut setidaknya penulis mengidentifikasi beberapa indikator yang diperlukan untuk mencatat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan usaha investasi asing di Provinsi Jawa Tengah seperti :

#### **a. Variabel Lingkungan**

Variabel lingkungan dalam skripsi ini merupakan variabel atau faktor yang mempengaruhi proses penanaman modal asing yang digunakan sebagai modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menarik minat investor asing. Karena dengan kondisi lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang menjamin dan terkendali, maka investor asing merasa bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang dapat diberi kepercayaan dalam kegiatan menyimpan keuntungan mereka di masa depan. Faktor-faktor lingkungan yang perlu diperhatikan oleh Provinsi Jawa Tengah

---

<sup>16</sup>Rugman, A. M. Ibid. Hlm. 149.

sebagai modal ialah faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi yang menjamin aktivitas penanaman modal.

### **1) Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi dalam skripsi ini merupakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dari setiap wilayah yang mencakup Jawa Tengah seperti potensi pada bidang perikanan, pertambangan kecil, perkebunan, peternakan, pertanian bahkan perhutanan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu jumlah tenaga kerja yang banyak meskipun SDM yang masih rendah dan upah yang disesuaikan dengan

### **2) Faktor Non-Ekonomi**

Faktor non ekonomi merupakan faktor-faktor yang meliputi politik, budaya dan sosial serta landasan hukum yang ikut menjadi bagian dari faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kondisi penanaman modal asing. Kondisi politik di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sangat kondusif bagi investor asing, diharapkan akan dapat meningkatkan penanaman modal asing di Jawa Tengah. Karena jarang dan bahkan tidak pernah menemukan adanya tindakan kekerasan maupun kerusuhan. Dengan kondisi politik yang kondusif atau dengan kata lain kondisi yang nyaman bagi investor asing di Provinsi Jawa Tengah akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tergolong sebagai pemerintah yang mendukung investasi, dibuktikan dengan adanya kemudahan yang

diberikan oleh Pemerintah dalam bidang perizinan investasi asing dan angka realisasi investasi asing yang meningkat dari tahun ke tahun.

Penduduk di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari beragam suku kebudayaan dan golongan sosial yang secara garis besar terdiri dari suku etnis Jawa, tionghoa dan samin. Beragam etnis tersebut telah hidup berdampingan sejak lama tanpa perselisihan antar suku. Hal ini terlihat dari kehidupan penduduk yang telah berbaur satu sama lain walaupun berbeda etnis. Penduduk Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai orang yang ramah juga menjadi poin pertimbangan investor asing, karena dengan sifat orang Jawa yang ramah akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor.

Sedangkan dalam hal dasar hukum investasi maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1979 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk melaksanakan UU tersebut maka dibentuk badan yang menangani penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **b. Variabel Internalisasi**

Faktor pemerintah yang terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu daerah. Dengan adanya teori penanaman modal Provinsi Jawa

tengah diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Provinsi Jawa Tengah berupaya mencari simbol yang berbeda dengan daerah lain untuk meningkatkan daya saing iklim investasi yang ramah sesuai visinya yaitu :

*“menjadi lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari”<sup>17</sup>*

Meningkatkan daya saing iklim investasi yang ramah maksudnya adalah merubah suasana penanaman modal asing (PMA) di Jawa Tengah menjadi lebih profesional dalam hal pelayanan kepada calon investor asing. Dengan mengubah iklim atau suasana baik suasana politik, keamanan, lingkungan, bahkan proses pengurusan izin yang lebih singkat untuk menanamkan modal di daerah Jawa Tengah maka akan dapat mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

### **3. Kosep Paradiplomasi**

Menurut Panayotis Soldatos istilah *“paradiplomacy”* merupakan penggabungan istilah *“parallel diplomacy”* menjadi *“paraciplomacy”*, istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1980-an. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak

---

<sup>17</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. -, *“Visi dan Misi Jawa Tengah.”* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diakses dari [http://dpmptsp.jatengprov.go.id/index.php/page/visi\\_dan\\_misi](http://dpmptsp.jatengprov.go.id/index.php/page/visi_dan_misi) pada 10 Desember 2016



asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*” atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.<sup>18</sup>

Sedangkan, menurut Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos, konsep *paradiplomacy* adalah:

“*Refers to direct international activity by sub-national actors (federated units, regions, urban communities, cities) supporting, complementing, correcting, duplicating or challenging the nation-states diplomacy*”<sup>19</sup>

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor *sub-state*, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintah pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri.<sup>20</sup> Paradiplomasi juga dapat meningkatkan hubungan dan relasi kerjasama ekonomi maupun politik secara global. Dalam konsep ini juga menyatakan bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan karena adanya kepentingan yang dimiliki. Kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah tentunya berbeda-beda, namun biasanya kepentingan tersebut terkait dengan masalah pembangunan daerah.

Pola politik internasional yang ada di Indonesia di atur dalam otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajiban terhadap satu daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya, serta kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan dan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Takdir Ali Mukti. Op.cit., hlm.2.

<sup>19</sup> Anayotis Soldatos. (1990), “*An Explanatory Framework for The Study of Federated States as Foreign Policy Actors*” dalam Hans J. Michelmann and PanayotisSoldatos. *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 17.

<sup>20</sup> Takdir Ali Mukti. Op.cit., hlm. 37.

yang berlaku. Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autonomos / autonomia*”, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*).<sup>21</sup> Otonomi adalah bentuk pemerintah sendiri (*self government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*).<sup>22</sup>

Dalam hal ini desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif terjadi di Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna meningkatkan hubungan Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai negara dunia yang menanamkan modalnya disana. Serta untuk mencapai kepentingan dari DPMPTSP sendiri yaitu meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus menerima bantuan dari pemerintah pusat, justru membantu pemerintah pusat untuk mewujudkan iklim penanaman modal di Indonesia yang memberikan kesan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah mempunyai otonomi daerah dapat menentukan kebijakan dengan mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan didukung Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu.<sup>23</sup>

Sesuai konsep *Paradiplomacy* menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan pada konsep lingkungan, karena adanya kepentingan

---

<sup>21</sup> Takdir Ali Mukti Op.cit., hlm 1.

<sup>22</sup> Takdri Ali Mukti. Loc.cit.,

<sup>23</sup> Takdir Ali. Mukti. Op.cit., hlm. 79.

yang sama antar kedua belah pihak yaitu untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Provinsi Jawa Tengah menyadari memiliki kelimpahan sumber daya alam (SDA) melimpah akan tetapi minimnya sumber daya manusia (SDM) sehingga mereka mencari solusi agar SDA yang ada dapat diolah dan menghasilkan nilai sehingga memberikan keuntungan untuk masa mendatang. Maka, membuka pintu bagi investor asing untuk menanamkan modal mereka di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu langkah memaksimalkan potensi yang tersedia. Jawa Tengah dengan kepentingan memaksimalkan potensi yang tersedia agar dapat mendapatkan keuntungan di masa mendatang dan menunjukkan kualitas kelayakan sebagai wilayah industri yang pro investasi. Serta kepentingan investor asing untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk nominal dan hasil produksi. Kepentingan kedua belah pihak baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun investor asing sebenarnya sama-sama untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Akan tetapi pada hal ini Pemerintah Pusat memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pelaksanaan hubungannya dengan investor asing yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik maupun lingkungan Jawa Tengah agar setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat tidak memberikan kerugian lebih bagi Jawa Tengah dan calon investor asing.

#### **D. Hipotesa**

Sesuai dengan konsep strategi, konsep paradiplomasi dan teori penanaman modal serta melihat permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan bahwa

strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi asing adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi birokrasi.
2. Melakukan promosi melalui diplomasi dalam bentuk *business forum* dan *international meeting*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumuan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menarik investasi asing tahun 2013-2015.
3. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Metodologi Penelitian Dan Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yaitu dengan melihat secara seksama dan penuh perhatian terhadap objek yang diteliti dengan cara wawancara, yakni pengumpulan data melalui tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten menyangkut permasalahan yang dibahas. Dengan pihak perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah terkait seperti dari buku-buku, dokumen, arsip, laporan maupun koran, majalah, internet, jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan yang dirumuskan, sehingga penulis membatasi tulisan yang akan dibahas. Penulis menetapkan jangkauan penelitian dalam tulisan ini adalah strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menarik investasi asing 2013-2015. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penulis menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2013 maupun sesudah tahun 2015 sebagai unit eksplanasi yang memperkuat analisis sebagai referensi atau sebagai catatan yang berfungsi untuk memperjelas data yang telah ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Investasi di Jawa Tengah Pada Era Globalisasi**

Pada sub-bab akan menjelaskan tentang kondisi umum Provinsi Jawa Tengah, sehingga memunculkan perkembangan investasi dalam bentuk penanaman modal, mekanisme investasi di Indonesia disertai potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah sehingga menarik investor asing melakukan investasi di daerah.

**BAB III : Alasan dan Permasalahan Investasi Asing di Jawa Tengah**

Pada sub-bab akan menjelaskan alasan yang terdiri dari hal-hal yang menarik investor asing untuk menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah, dan permasalahan yang muncul di tengah aktivitas penanaman modal asing serta perbandingan realisasi investasi asing Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi sekitar.

**BAB IV : Pelaksanaan Strategi Menarik Investasi Asing ke Provinsi Jawa Tengah**

Pada sub-bab akan menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi asing pada tahun 2013 - 2015 yang berada di bawah wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

**BAB V : Kesimpulan**

Pada sub-bab akan menguraikan kesimpulan dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menarik investasi asing 2013-2015.

